

REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN

NAMA SKPD/OPD/UP1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Perizinan Bangunan dan Lingkungan

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Risiko				Rencana pengendalian	Pemilik risiko/ penanggung jawab
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/ peringkat risiko		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=10 x 11	(13)	(14)	(15)
	Pelayanan Perizinan Bangunan dan Lingkungan													
1	Pelayanan Izin Penetapan Lokasi	Memberikan pelayanan Izin Penetapan Lokasi	1	Gugatan Izin Penetapan Lokasi	Penolakan masyarakat pemilik tanah yang akan dibebaskan	UC	Pencabutan Izin Penetapan Lokasi	Melakukan Rapat Tim Teknis dan peninjauan lokasi sebelum menerbitkan Izin Penetapan Lokasi	1	1	1	R	Melakukan Rapat Tim Teknis dan peninjauan lokasi sebelum menerbitkan Izin Penetapan Lokasi	Penanggungjawab Izin
2	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi	Memberikan Pelayanan Pemenuhan Izin Lokasi	1	Tidak sesuai dengan RTRW	Titik koordinat tidak sesuai	C	Izin Lokasi ditolak	Dilengkapi PTP dan jika perlu rapat tim teknis dan peninjauan lokasi	2	2	4	S	Dilengkapi PTP dan jika perlu rapat tim teknis dan peninjauan lokasi	Pelaku Usaha
3	Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan	Memberikan layanan pemenuhan komitmen ijin lingkungan	1	Gugatan terhadap Izin Lingkungan yang telah terbit	Penolakan oleh masyarakat	C	Pencabutan Izin Lingkungan	Rapat Tim Teknis dalam rangka pembahasan Dokumen Lingkungan	1	1	1	R	Rapat Tim Teknis dalam rangka pembahasan Dokumen Lingkungan	Pelaku Usaha
4	Layanan Izin Lingkungan	Memberikan layanan Izin Lingkungan	1	Gugatan terhadap Izin Lingkungan yang telah terbit	Penolakan oleh masyarakat	C	Pencabutan Izin Lingkungan	Rapat Tim Teknis dalam rangka pembahasan Dokumen Lingkungan	1	1	1	R	Rapat Tim Teknis dalam rangka pembahasan Dokumen Lingkungan	Pelaku Usaha
5	Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan	Memberikan layanan IMB	1	Gugatan terhadap IMB yang telah terbit	Tidak Sesuai RTRW, aktivitas dalam bangunan mengganggu masyarakat	C	Pencabutan IMB	Verifikasi administrasi dan teknis serta cek lapangan sebelum penerbitan IMB	1	1	1	R	Verifikasi administrasi dan teknis serta cek lapangan sebelum penerbitan IMB	Pemilik IMB

6	Pelayanan Izin TPS Limbah B3	Memberikan layanan Izin TPS Limbah B3	1	Pelanggaran terhadap Izin yang telah diberikan	Limbah B3 tidak disimpan dengan baik	C	Pencabutan Izin TPS Limbah B3	Pengawasan pelaksanaan Izin TPS Limbah B3 bersamaan dengan wasdal Izin Lingkungan	2	2	4	S	Pengawasan pelaksanaan Izin TPS Limbah B3 bersamaan dengan wasdal Izin Lingkungan	Penanggungjawab Izin
7	Pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah	Memberikan Layanan Izin Pembuangan Air Limbah	1	Pelanggaran terhadap Izin yang telah diberikan	Air limbah yang dibuang diatas Baku mutu air Limbah	C	Pencabutan Izin PAL	Pengawasan pelaksanaan Izin PAL bersamaan dengan wasdal Izin Lingkungan	2	3	6	S	Pengawasan pelaksanaan Izin PAL bersamaan dengan wasdal Izin Lingkungan	Penanggungjawab Izin
	Pelayanan Perizinan Pemakaian Kekayaan Daerah							ba Sinkronisasi Data LRA dan LO						
8	Pemakaian Kelayaan Daerah	Kelancaran penerbitan perizinan dengan cepat dan sesuai ketentuan	1	Surat Izin terlambat penerbitannya	disebabkan pemohon mengajukan pembebasan biaya ke Bupati		mempengaruhi pemohon izin berikutnya karena harus menunggu disposisi Bupati	pemberitahuan kepada personil melalui telepon / HP	1	1	1	R	Koordinasi dengan Ajudan Bupati	Pemohon izin
			2	Pengajuan izin ditolak	disebabkan penggunaan PKD tidak sesuai ketentuan (misal, pemohon izin disponsori perusahaan rokok)		Potensi Retribusi menjadi hilang	1. Agar menggunakan kekayaan daerah ditempat lain 2. Agar tdk membawa sponsor dari perusahaan rokok					Melakukan sosialisai Tentang larangan mengikutsertakan sponsor rokok di daerah tertentu	Pemohon izin

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

H. SLAMET MUSTOLKHAH,ST.MT
NIP. 19690922 199703 1 005

Target Waktu
(16)
6 hari kerja
2 hari kerja
15 hari kerja
15 hari kerja
14 hari kerja

45 hari kerja
90 hari kerja
5 (lima) hari